

Judul : BPKH Bakal Optimalkan Investasi Dana Haji
Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 14

BPKH Bakal Optimalkan Investasi Dana Haji

Investasi langsung menjadi salah program prioritas yang akan dimaksimalkan

Ratih Waseso Aji

JAKARTA. Pemerintah berniat mengoptimalkan pengelolaan dana haji di masa mendatang. Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana menjalin kerjasama yang lebih masif dengan berbagai pihak.

Harry Alexander, Anggota Pelaksana BPKH mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mengoptimalkan manfaat dana haji bagi masyarakat. Salah satunya melalui perbaikan komposisi investasi atau penempatan dana haji.

Dalam komposisi terbaru, BPKH akan mengalokasikan investasi dana pengelolaan haji maksimal 30% di deposito syariah. Sebelumnya porsi penempatan di deposito syariah bisa mencapai 50%.

Berikutnya adalah porsi investasi langsung yang ditetapkan sebesar 30%. Porsi inves-

tasi langsung ini sudah sesuai dengan ketentuan. Sisanya akan ditempatkan di instrumen sukuk berbasis syariah, seperti surat berharga syariah negara (SBSN).

"Dalam penempatan investasi (langsung) tentu harus lebih besar. Saya kira dari kerangka hukum kebijakan, kami akan terus bekerja sama dengan DPR dan pemerintah agar kerangka hukum lebih kuat dan lebih aman demi kesejahteraan jemaah haji," jelas Harry, Senin (17/10).

Amri Yusuf, Anggota Pelaksana BPKH lainnya menambahkan, dalam memaksimalkan pengelolaan dana haji, yang paling utama bukan hanya imbal hasil investasi. Tak kalah pentingnya adalah memastikan aspek keamanan dana umat.

Nah, alokasi investasi penempatan dana haji itu telah mempertimbangkan aspek keamanan itu. Termasuk pi-

lian penempatan dalam investasi langsung.

"Kita mengetahui bersama, sekarang ini masih suasana rezim suku bunga rendah, jadi tidak ada instrumen investasi yang seketika bisa *double* digit. Jadi, yang paling penting buat BPKH selain imbal hasil adalah dananya aman. Karena ini adalah dana titipan sejuta umat, sehingga harus ekstra hati-hati mengelolanya," jelas Amri.

Prinsip kehati-hatian

Amri menyebut, investasi langsung dana haji akan difokuskan pada upaya menciptakan ekosistem pelayanan haji terintegrasi, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi jemaah haji Indonesia.

Ia mencontohkan, dana konsumsi jemaah haji yang selama ini menjadi pos pengeluaran terbesar. Nah, jika hal itu dapat dikelola dengan

baik, maka dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Jadi, ada peluang untuk berinvestasi dalam bisnis konsumsi bagi jemaah di Tanah Suci.

Guna mematangkan rencana pengembangan investasi langsung ini, BPKH akan terus berkomunikasi, baik dengan Kementerian Agama maupun DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, prinsip utama BPKH adalah menjaga dana haji agar terus berkelanjutan.

"Artinya selalu siap dalam kondisi apapun, jangan sampai ke depan ketika kuota haji dari Otoritas Arab Saudi lebih maksimal, kita justru tidak siap," kata Bukhori.

Perkembangan Nilai Kelolaan Dana Haji
(Triliun rupiah)

